

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU ( BAWASLU ) UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Disusun oleh :

**Mutia Hikma Fitriani**

**2120600037**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# 

# 

# PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobil’alamin, atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dalam menyusun skripsi ini saya telah melewati suka dan duka, pengalaman, pelajaran, serta kenangan, maka dari itu dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Sujud syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan.
2. Terimakasih untuk diri saya sendiri, karena sudah mau bertahan sampai saat ini.
3. Terimakasih untuk Mamah Tarniti mamahku tercinta. Terimakasih sudah menjadi mamah sekaligus papah setahun belakangan ini dan sampai akhir hayat, mamahku yang hebat, yang kuat, terimakasih atas segala-galanya, I love you somuch.
4. Terimaksih untuk Alm. Papah Umar Suparno papahku tercinta, papahku tersayang, walaupun beliau sudah tidak ada didunia ini lagi, tetapi kasih sayang, peran beliau tidak akan pernah terlupakan sepanjang masa, I love you, I miss you so much, al-fatihah.
5. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing I saya, Bapak Unggul Sugiharto, M.Si. yang selama ini sudah mau membimbing saya untuk mengerjakan skripsi ini, tanpa beliau saya tidak akan sampai di titik ini.
6. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing II saya, Bapak Akhmad Habibullah, M.IP, terimakasih sudah sabar menghadapi mahasiswa seperti saya, dan terimakasih sudah mau membimbing saya sampai semua selesai.
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tercinta, Leni Suciatun S, Windari Amelia, Lestari Puji A, Nabilahtun Husna A dan Darin Sabina M. yang senantiasa selalu mensuport, mengingatkan, menguatkan, tanpa kalian aku tidak akan bisa sampai di titik ini, terimakasih banyak-banyak love.
8. Terimakasih kepada keluarga besar yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan.
9. Terimakasih Sahabat- Sahabatku, Teman-temanku Luth Latifah, Soraya Putri A, Wulandari, Sri Devi, Kartika Sari, Meisya, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang kalian yang tidak pernah pudar sampai saat ini, terimakasih sudah hadir dihidupku dan selalu menghibur saat sedih melanda.
10. Terimakasih untuk kamu yang sudah banyak berkontribusi pada proses pembuatan skripsi ini, terimakasih atas suportnya, atas waktunya, sekali lagi terimakasih sekali dan maaf sudah selalu merepotkan ya.
11. Terimaksih teman – teman untuk Kelas B Ilmu Pemerintahan yang sudah mendoakan dan saling support.
12. Terimaksih teman – teman khususnya untuk Ilmu Pemerintahan yang sudah memberikan dukungan dan doa hingga saat ini.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk melanjutkan penelitian skripsi sebagai tugas akhir penulisan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan hikmat dan karuniaNya sampai penulisan skkripsi ini selesai.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugiharto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Unggul Sugiharto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini
5. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
7. Ibu Aliyah selaku Komisioner Bawaslu Kota Tegal, Mba Ria selaku anggota Bawaslu Kota Tegal dan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan di Kota Tegal yang telah memberikan data dan bersedia menjadi informan sehingga penelitian dalam skripsi saya dapat terselesaikan

Namun Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekuragan, karena keterbatassan penulis, harapan penulis skrispi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca khususnya di lingkungan Fakultas.

Penulis

Mutia HikmaFitriani

# Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai hak dan kekuasaan besar, Pengawasan dalam pemilu merujuk pada serangkaian tindakan dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Hal yang mendasari mengapa pengawasan pemilu perlu melibatkan partisipasi masyarakat adalah: pertama, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kota Tegal merupakan salah satu daerah Kota yang turut ikut melaksanakan Pemilu dan serentak pada Tahun 2024. Pelaksanaan pemilu serentak yang diprediksi memiliki tantangan yang besar, maka semua pihak yang berkompeten terlebih penyelenggara pemilu dituntut untuk menciptakan strategi yang efektif untuk mensukseskan pemilu yang jurdil. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Nvivo. Pada hasil penelitian ini, Peneliti membahas strategi badan pengawas pemilu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tegal dengan menggunakan teori manajemen strategi dari Fred R. David menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur strategi diantaranya adalah perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi.

**Kata Kunci:** Strategi Bawaslu, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemilu.

# Abstract

*General Election (Pemilu) is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, According to Law Number 7 of 2017 Bawaslu has great rights and powers, Supervision in elections refers to a series of actions and processes designed to ensure that elections take place fairly, honestly, and transparently. The underlying reason why election supervision needs to involve community participation is: first, that sovereignty is in the hands of the people and elections are a means of implementing people's sovereignty. Tegal City is one of the cities that also participated in implementing simultaneous elections in 2024. The implementation of simultaneous elections which are predicted to have major challenges, so all competent parties, especially election organizers, are required to create effective strategies to make elections successful that are fair, with integrity and fair. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques use interviews and documentation. Data analysis techniques using Nvivo. In the results of this study, the researcher discusses the strategy of the election supervisory body to encourage public participation in supervising the 2024 general election in Tegal City using Fred R. David's strategic management theory. He explains several indicators that can be used to measure strategy, including strategy formulation, strategy implementation, strategy evaluation.*

***Keyword:*** *Bawaslu Strategy, Public Participation, Election Supervision*

# MOTTO

“Tetap hidup ya, meski banyak hal yang membuat kamu gila, kecewa, marah, kesal,seolah-olah tidak ada yang berpihak padamu, percaya Allah SWT punya sesuatu untukmu”

(quotewound)

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah:286)

“papah tunggu kamu wisuda ya nok, papah pengen pake jas nanti”

(papahku)

(walaupun pada akhirnya beliau sudah mendahului saya karena kehendak Allah SWT)

Al-Fatihah.

# DAFTAR ISI

[**PERSEMBAHAN** i](#_Toc173130358)

[**KATA PENGANTAR** iii](#_Toc173130359)

[**Abstrak** v](#_Toc173130360)

[**Abstract** vi](#_Toc173130361)

[**MOTTO** vii](#_Toc173130362)

[**DAFTAR ISI** 1](#_Toc173130363)

[**DAFTAR TABEL** 5](#_Toc173130364)

[**DAFTAR GAMBAR** 6](#_Toc173130365)

[**BAB I PENDAHULUAN** 8](#_Toc173130366)

[I.1 Latar Belakang 8](#_Toc173130367)

[I.2 Rumusan Masalah 25](#_Toc173130368)

[I.3 Tujuan Penelitian 25](#_Toc173130369)

[I.3.1 Tujuan Penelitian 25](#_Toc173130370)

[I.4 Manfaat Penelitian 25](#_Toc173130371)

[I.4.1 Bagi Peneliti 25](#_Toc173130372)

[I.4.2 Bagi Lembaga Bawaslu 26](#_Toc173130373)

[**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** 27](#_Toc173130374)

[II.1. Kerangka Teori 27](#_Toc173130375)

[II.1.1 Penelitian Terdahulu 32](#_Toc173130376)

[II.1.2 Strategi 32](#_Toc173130377)

[II.1.3 Pengawasan 41](#_Toc173130378)

[II.1.4 Partisipasi Masyarakat 46](#_Toc173130379)

[II.1.4.1 Pengawasan Pemilu 52](#_Toc173130380)

[II.2 Definisi Konsep 56](#_Toc173130381)

[II.3 Pokok-Pokok Penelitian 57](#_Toc173130382)

[II.4 Alur Pikir 58](#_Toc173130383)

[**BAB III METODE PENELITIAN** 59](#_Toc173130384)

[III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 59](#_Toc173130385)

[III.2 Lokus Penelitian 59](#_Toc173130386)

[III.3 Jenis dan Sumber Data 59](#_Toc173130387)

[III.4 Informan Penelitian 60](#_Toc173130388)

[III.5 Teknik Pengumpulan Data 61](#_Toc173130389)

[III.6 Teknik Analisis Data 61](#_Toc173130390)

[III.7 Sistematika Penulisan 62](#_Toc173130391)

[**BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN** 64](#_Toc173130399)

[IV.1 Gambaran Umum 64](#_Toc173130400)

[IV.1.1 Keadaan Geografis 64](#_Toc173130401)

[IV.2 Wilayah Administrasi 66](#_Toc173130402)

[IV.3 Kondisi Pemerintahan 66](#_Toc173130403)

[IV.4 Visi dan Misi Kota Tegal 67](#_Toc173130404)

[IV.5 Kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 68](#_Toc173130405)

[IV.6 Kondisi Kependudukan 69](#_Toc173130406)

[IV.7 Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal 70](#_Toc173130407)

[IV.8 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal 71](#_Toc173130408)

[**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 75](#_Toc173130409)

[V.1 Hasil Penelitian 75](#_Toc173130410)

[V.1.1 Strategi badan pengawas pemilu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2024 di Kota Tegal 75](#_Toc173130411)

[V.1.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kota Tegal 87](#_Toc173130412)

[V.2 Pembahasan Hasil Penelitian 89](#_Toc173130413)

[V.2.1 Strategi Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024 di Kota Tegal 91](#_Toc173130414)

[V.2.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kota Tegal 95](#_Toc173130415)

[**BAB VI PENUTUP** 102](#_Toc173130416)

[VI.1 Kesimpulan 102](#_Toc173130417)

[VI.2 Saran 103](#_Toc173130418)

[DAFTAR PUSTAKA 104](#_Toc173130419)

[LAMPIRAN 106](#_Toc173130420)

**DAFTAR TABEL**

[Table II.1 Penelitian Terdahulu 27](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table III.1 Informan Penelitian 60](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table IV.1 Tingkat Pendidikan PNS di Kota Tegal 67](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table IV.2 Jumlah Anggota DPR Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal 68](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal 69](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table V.1 Hasil Coding Perumusan Startegi 76](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table V.2 Hasil Coding Implementasi Startegi 79](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table V.3 Hasil Coding Evaluasi Startegi 82](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281)

[Table V.4 Hasil Coding Panwascam](https://d.docs.live.net/3ac2e05eb9444a7e/Documents/BISMILLAH/PROPOSAL%20SKRIPSI%20BAB%201%202%203%20(REAL)%20NEW%20!!!!!!!!!!!!.doc" \l "_Toc141655281) 84

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 12

Gambar I.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat pda Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 13

Gambar I.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat pda Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 14

Gambar I.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan DPRD Kota Tegal pada Tahun 2014 15

Gambar I.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan DPRD Kota Tegal pada Tahun 2014 16

Gambar I.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan DPRD Kota Tegal pada Tahun 2019 17

Gambar 1.7 Bawaslu Kota Tegal Ajak Organisasi Pemuda Awasi Konten Pemilu 2024 di Media Sosial 19

Gambar I.8 Bawaslu Kota Tegal Ajak Masyarakat dan Media Awasi Pemilu 2024 di Internet 21

Gambar II.1Alur Pikir 58

Gambar III.1 Tahapan Analisis Data Nvivo 12 Plus 62

Gambar IV.1 Peta Kota Tegal 65

Gambar V.1 Word Cloud Strategi Bawaslu Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kota Tegal 90

Gambar V.2 Clustur Analysis Startegi Bawaslu 91

Gambar V.3 Project Map Strategi Bawaslu 92

Gambar V.4 Word Tree Startegi Bawaslu 95

Gambar V.5 Project Map Panwascam 97

Gambar V.6 Word Tree Panwascam 101

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pemilu merupakan awal dari berbagai rangkaian kehidupan negara demokratis, Pemilu juga merupakan sebuah proses atau sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dalam rangka untuk memilih seorang wakil atau pemimpin, sehingga pemilu merupakan motor penggerak dari mekanisme sistem politik yang legal terhadap suksesi kepemimpinan dalam negara demokrasi. Pemilu menjadi penting sebab berfungsi memberikan legitimasi kekuasaan bagi kontestan yang menjadi pemenang.

Di negara Indonesia, pemilihan dan pengangkatan pemimpin dilakukan lewat sebuah proses yang bernama Pemilu. Setiap orang memiliki hak untuk memilih atau dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, meskipun ada hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi yang salah satunya tentu bukan dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan yang diinginkan.Dalam pelaksanaannya, Peserta Pemilu menawarkan janji serta program yang menjadi visi misi mereka untuk menarik minat masyarakat atau konstituen untuk memilih pemimpin yang diusung. Masyarakatpun seolah terbius dengan janji dan program yang diusung dan ditawarkan oleh mereka yang berkompetisi, meski kadang kala janji dan program yang dilontarkan saat pelaksanaan kampanye tak jarang seolah dilupakan oleh mereka ketika telah menjadi seorang pemimpin.

Pemilihan umum sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, Suatu negara dapat dikatakan demokratis, jika warga negaranya sadar dan mau berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum agar proses berjalannya demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Pemilihan umum berjalan secara umum, langsung, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu dalam pengawasan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

**Tabel I.1 Rekapitulasi daftar pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | L | P | L+P |
| 1. | Tegal Timur | 5 | 227 | 31.485 | 32.336 | 63.821 |
| 2. | Tegal Selatan | 8 | 185 | 26.096 | 25.608 | 51.704 |
| 3. | Margadana | 7 | 166 | 22.899 | 22.614 | 45.513 |
| 4. | Tegal Barat | 7 | 185 | 25.837 | 25.925 | 51.762 |
| TOTAL | | 27 | 763 | 106.317 | 106.843 | 212.800 |

*Sumber: Bawaslu Kota Tegal*

Pada table di atas menjelaskan bahwa di Kota Tegal terdapat 4 Kecamatan, pada Kecamatan Tegal Timur terdiri dari 5 Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah TPS 227 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 31.485 dan Perempuan sebanyak 32.336, pada Kecamatan Tegal Selatan terdiri dari 8 Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah TPS 185 dengan jumlah penduduk laki-laki 26.2096 dan perempuan sebanyak 25.608. Pada Kecamatan Margadana terdiri dari 7 Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah TPS 166 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 22.899 dan perempuan sebanyak 22.614, pada Kecamatan Tegal Barat terdiri dari 7 Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah TPS 185 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25.837 dan perempuan sebanyak 25.925, jadi total Kelurahan/Desa pada Kota Tegal berjumlah 27, total jumlah TPS sebanyak 763, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Tegal sebanyak 212.800.

**Table I.2 Rekap Data penanganan Pelanggaran**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kab/Kota | Laporan | | Hasil Penanganan Pelanggaran | |
| 1 | Kota Tegal | Registrasi | Tidak Registrasi | Pelanggaran | Bukan Pelanggaran |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

*Sumber: Bawaslu Kota Tegal*

Pada table I.2 di Kota Tegal mempunya dugaan laporan yang beregistrasi sebanyak 1 dan yang tidak registrasi sebanyak 1 untuk hasil penanganan pelanggarannya dengan jumlah pelanggaran 0, sedangkan jumlah yang bukan pelanggaran 1.

**Table I.3 Rincian Data Penanganan Pelanggaran Kota Tegal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahapan | Terlapor | | Hasil Kajian Awal | Hasil Penanganan Pelanggaran |
| 1 | Pemungutan dan penghitungan suara | WNI | KPPS | Registrasi (offline) | Bukan pelanggaran |
| 2 | Pemungutan dan penghitungansuara | WNI | KPPS | Registrasi (offline) | Bukan pelanggaran |

*Sumber: Bawaslu Kota Tegal*

Pada table I.3 Rincian Data Penanganan Pelanggaran Kota Tegal pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara dengan terlapor WNI pada hasil kajian awal beregistrasi (offline) dengan hasil penanganan pelanggaran yaitu bukan pelanggaran.

**Gambar I.1 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Tegal 2024 & Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber: Bawaslu Kota Tegal*

Profesionalitas penyelenggara pemilihan umum menjadi jantung dari kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan, jika aspek profesionalisme ini tidak dijaga dan dikuatkan, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan umum. Hal ini disampaikan dalam launching IKP bertempat di RedTop hotel Jakarta tang 16 Desember 2023. Dari empat dimensi yang diukur dalam indeks tersebut, dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kerawanan pemilu. Dimensi penyelenggaraan pemilu ini lebih tinggi konstribusinya terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Konstribusi dimensi penyelenggaraan pemilu yang lebih besar peluangnya melahirkan Kerawanan di pemilu ini tidak saja terlihat di IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di tingkat provinsi, namun juga terekam di tingkat kabupaten/kota.

Di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27.

Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Terakhir, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23. Adapun ditingkat kabupaten/kota. Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22. Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politikdengan skor 3,83. Data IKP Bawaslu kota Tegal dari 4 dimensi secara nasional masuk kategori sedang diantaranya dimensi penyelenggaraan pemilu 44,68  dimensi sosial politik 8,11 dimensi partisipasi 0 dimensi kontestasi 59,25, total keseluruhan IKP Kota Tegal 33,98. Sedangkan IKP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dari 4 dimensi secara nasional juga masuk dalam kategori sedang diantaranya dimensi penyelenggaraan pemilu 91,66 dimensi sosial politik 0 dimensi partisipasi 0 dimensi kontestasi 0 total keseluruhan IKP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 34,83.

Bawaslu melakukan pengawasan yang berawal dari tingkat pusat sampai ke tingkat lapangan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai hak dan kekuasaan besar, Pengawasan dalam pemilu merujuk pada serangkaian tindakan dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menghindari kecurangan, manipulasi, atau intimidasi selama proses pemilihan, Pentingnya pengawasan dalam pemilu adalah untuk menjaga integritas demokrasi, memastikan bahwa keinginan rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan, dan memelihara kepercayaan publik terhadap proses politik.. tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara dimana tugas tersebut yaitu menyusun standar pengawasan penyelenggaraan pemilu, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralisasi tentara nasional Indonesia, netralisasi kepolisian Indonesia, dan mencegah terjadinya politik uang.(Syarbaini et al., 2021)

Tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu sangat komplek, maka untuk lebih menjamin efektifitas pengawasan pemilu, dipandang perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik karena adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan penguasa (Budiarjo, 2008).

Hal yang mendasari mengapa pengawasan pemilu perlu melibatkan partisipasi masyarakat adalah: pertama, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat (Pasal 1 UUD 1945) dan pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini masyarakat merupakan stakeholder atau pemangku kepentingan, bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Bukankah pemilu merupakan suksesi kepemimpinan, baik nasional maupun daerah, yang paling demokratis. Kedua, Jumlah personil Bawaslu sangat terbatas untuk area pengawasan yang sangat luas, baik dari sisi wilayah maupun objek yang diawasi.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Personil Bawaslu dan jajarannya tidak cukup efektif melakukan pengawasan tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, agar proses penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil bisa terwujud. Maka partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemil mutlak dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemilu dan menjamin terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil, yang bersifat final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat.Salah satu upaya Bawaslu dalam mendorong terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah menyiapkan payung hukum berupa regulasi-regulasi dan menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat mengakses informasi, melakukan pengaduan, maupun melaporkan pelanggaran dengan mudah.

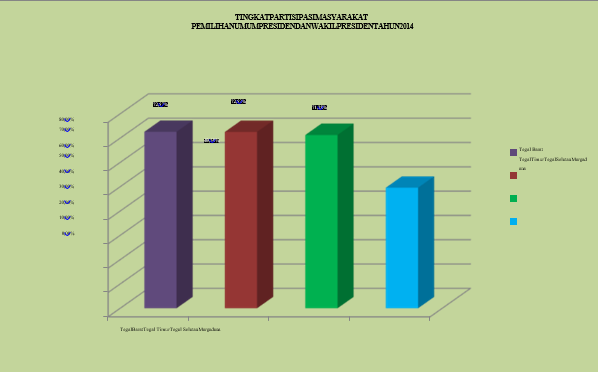
Bawaslu juga memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan jalan memperluas jaringan, mengembangkan model pengawasan, mengembangkan pembelajaran pengawasan, dan mengembangkan strategi pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Pengawasan pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat sangatlah penting sebagai upaya kontrol dari masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis karena minim pelanggaran (Winarto Set al., 2022)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesadaran politik, pendidikan, aksesibilitas pemungutan suara, serta kepercayaan terhadap integritas dan transparansi proses pemilu. Partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam demokrasi mereka, sementara partisipasi yang rendah dapat mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau apatisme politik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sering kali dianggap penting untuk memastikan representasi yang adil dan akuntabel dalam pemerintahan. Untuk meningkatkan partisipasi, pendekatan pendidikan politik, peningkatan transparansi dalam proses pemilu, dan menciptakan kesadaran akan pentingnya suara masyarakat dalam membentuk masa depan negara dapat menjadi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

**Gambar I.1Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan**

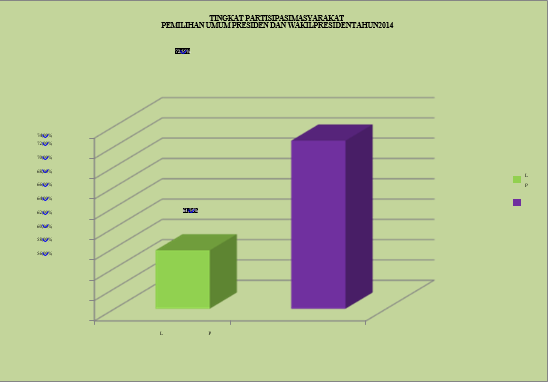
**Wakil Presiden Tahun 2014**

****

*Sumber: KPU Kota Tegal*

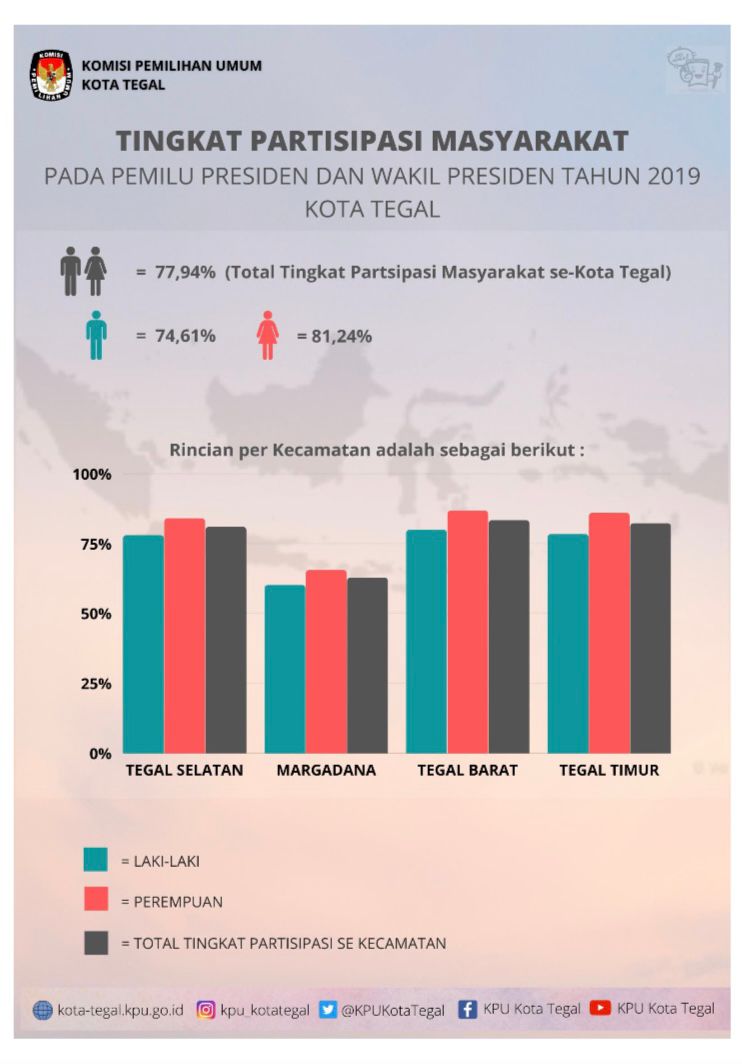
Pada gambar I.1 Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarkat pada Kota Tegal dibagi pada 4 Kecamatan yaitu Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan dan Margadana, pada gambar diatas dijelaskan bahwa Kecamatan Tegal Barat pada symbol berwarna ungu dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 72,57%, Kecamatan Tegal Timur pada symbol berwarna merah dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 72,52%, Kecamatan Tegal Selatan pada symbol berwarna hijau dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 71,28%, sedangkan Kecamatan Margadana pada symbol berwarna biru dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 49,59%.

**Gambar I.2**

****

*Sumber: KPU Kota Tegal*

Pada gambar I.2 untuk tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 antara laki-laki dengan symbol berwarna hijau sebanyak 61,74% dan perempuan sebanyak 72,55% di Kota Tegal.

**Gambar I.3Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

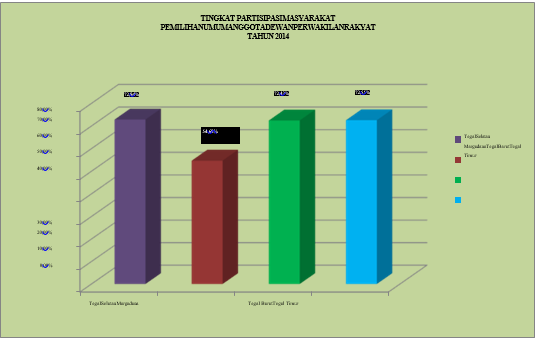
*Sumber : KPU Kota Tegal*

Pada gambar I.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada gambar diatas dijelaskan bahwa rincian perkecamatan pada Kota Tegal dibagi pada jumlah laki-laki dengan symbol berwarna hijau, perempuan dengan symbol berwarna merah dan total tingkat partisipasi sekecamatan dengan symbol berwarna hitam.

Kota Tegal dengan 4 Kecamatan yaitu Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan dan Margadana. Dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi pada laki laki dengan simbol berwarna hijau sebanyak 74,61%, tingkat partisipasi pada perempuan sebanyak 81,24%, sedangkat total tingkat partisipasi masyarakat se-Kota Tegal sebanyak 77,94%.

Dapat disimpulkan bahwa pada gambar I.1,I.2 dan I.3tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan 2019 bisa dilihat dari gambar bahwa total tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2014 adalah 67,14% sedangkan total tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 adalah 77,94% yang dimana sudah dapat dilihat bahwa perbandingan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014-2019 semakin meningkat karena pada tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat sebanyak 10,8%, walaupun belum meningkat hingga 80% rata-ratanya tetapi dalam periode 5 tahun tersebut sudah ada peningkatan untuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tegal.

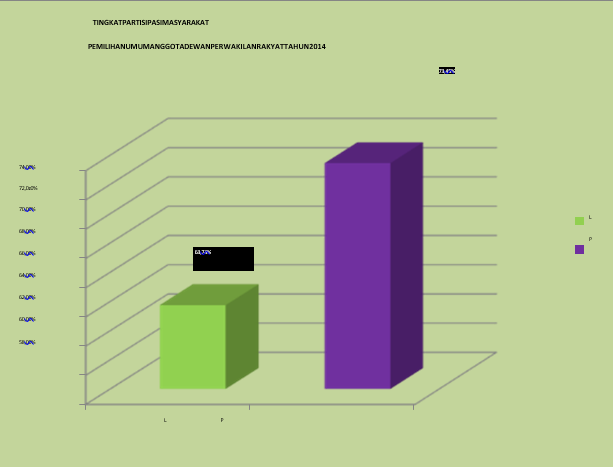
**Gambar I.4Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan DPRD Kota Tegal pada Tahun 2014**

****

*Sumber: KPU Kota Tegal*

Pada gambar I.4 Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan DPRD Kota Tegal tahun 2024 dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarkat pada Kota Tegal dibagi pada 4 Kecamatan yaitu Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan dan Margadana, pada gambar diatas dijelaskan bahwa Kecamatan Tegal Barat pada symbol berwarna ungu dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 72,84%, Kecamatan Tegal Timur pada symbol berwarna merah dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 54,68%, Kecamatan Tegal Selatan pada symbol berwarna hijau dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 72,43%, sedangkan Kecamatan Margadana pada symbol berwarna biru dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 72,55%.

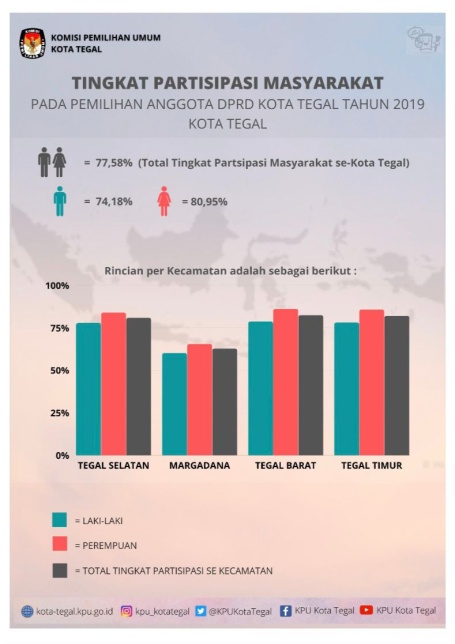
**Gambar I.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan DPR Kota Tegal pada Tahun 2014**

****

*Sumber: KPU Kota Tegal*

Pada gambar I.5 untuk tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 antara laki-laki dengan symbol berwarna hijau sebanyak 63,74% dan perempuan sebanyak 73,45% di Kota Tegal.

**Gambar I.6Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan DPRD Kota Tegal pada Tahun 2019**



*Sumber: KPU Kota Tegal*

Pada gambar I.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada gambar diatas dijelaskan bahwa rincian perkecamatan pada Kota Tegal dibagi pada jumlah laki-laki dengan symbol berwarna hijau, perempuan dengan symbol berwarna merah dan total tingkat partisipasi sekecamatan dengan symbol berwarna hitam.

Kota Tegal dengan 4 Kecamatan yaitu Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan dan Margadana. Dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi pada laki laki dengan simbol berwarna hijau sebanyak 74,18%, tingkat partisipasi pada perempuan sebanyak 80,95%, sedangkat total tingkat partisipasi masyarakat se-Kota Tegal sebanyak 77,58%.

Dapat disimpulkan bahwa pada gambar I.4,I.5 dan I.6 tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Tegal pada tahun 2014 dan 2019 bisa dilihat dari gambar bahwa total tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2014 adalah 68,59% sedangkan total tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Tegal pada tahun 2019 adalah 77,58% yang dimana sudah dapat dilihat bahwa perbandingan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Tegal tahun 2014-2019 semakin meningkat karena pada tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat sebanyak 8,99%, walaupun belum meningkat hingga 80% rata-ratanya tetapi dalam periode 5 tahun tersebut sudah ada peningkatan untuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Tegal.

Jadi, kesimpulannya adalah pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPRD pada tahun 2014 dan 2019 Tingkat Partisipasi Masyarakatnya cenderung meningkat, dapat dilihat dari total partisipasi masyarakat Kota Tegal yang semakin meningkat pada pemilu serentak tahun 2019. Tingkat Partisipasi Masyarakat akan selalu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi tingkat partisipasi masyarakat menjelang pemilu pada 5 tahun sekali.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu sangat penting. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan pada semua tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Semua itu merupakan bagian penting dan tak terpisahkan untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemilu merupakan tugas suatu instansi agar pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik, kehadiran Bawaslu dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif, dan efisien ((Aminuddin & Nasution, 2022)Saidi,2021).

Berikut adalah jadwal Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif :

1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ini merupakan salah satu dari bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal. Ada beberapa kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang menggandeng *stakeholder* seperti Bakesbangpol Kota Tegal ada juga yang berupa undangan dari dinas terkait dan beberapa merupakan kegiatan dari Bawaslu Kota Tegal. Diantaranya adalah:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Kesadaran Pengawasan Partisipatif”. Dilaksanakan pada 15 Maret 2023, bertempat di Hotel Riez Palace Tegal. Pesertadari TP. PKK Kota Tegal, TP. PKK Kecamatan se Kota Tegaldan TP. PKK Kelurahan se Kota Tegal. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Dr. Hamidah Abdurachman, SH, M.Hum (Dosen UPS Tegal), Ny. Patoni (TP. PKK Kota Tegal) dan Wiwoho Kertarto, S.Pd (AnggotaBawaslu Kota Tegal). Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pemilu harus diawasi karena sebagai sarana pertandingan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan ;
2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 sub tema "Mengawal Hak Pilih & Awasi Bakal Calon Legislatif DPRD Kota". Dilaksanakan 15 Mei 2023, bertempat Plaza Hotel by Horison. Peserta dari DPPKBPPPA Kota Tegal, LPMK se Kota Tegal, Karang Taruna Kota dan se Kota Tegal, FKUB, Kelompok Disabilitas dan Mahasiswa. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Abhan, SH., MH (Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022);
3. Webinar Pojok Pengawasan dengan tema “Netralitas ASN dalam Pemilu 2024”. Dilaksanakan 19 Oktober 2023, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tegal. Peserta berasal dari ASN dilingkungan Pemerintah Kota Tegal dan Masyarakat umum. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Lelys Siswinarti, S.STP dari BKPPD Kota Tegal, Kabid. Pengadaan, Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi ASN;
4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kelompok Sasaran Disabilitas Kota Tegal. Dilaksanakan 9 Mei 2023, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tegal. Peserta berasal dari Kelompok Disabilitas Tegal Bahari. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Wiwoho Kertarto, S.Pd (Anggota Bawaslu Kota Tegal). Bawaslu Kota Tegal melakukan kegiatan pengawasan partisipatif dengan mengundang tiga puluh orang yang sasarannya Disabilitas. Dimana dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa hal salah satunya adalah kelompok disabilitas kota Tegal dapat menggunakan hak pilih nya secara nyaman dan aman, mengetahui tahapan pemilu yang sudah terlaksana.

2. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Pendidikan Pengawasan Partisipatif di tahun 2023, Bawaslu Kota Tegal tidak melaksanakannya secara khusus yang diadakan sendiri oleh Bawaslu. Namun Bawaslu Kota Tegal diundang sebagai narasumber di kegiatan yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal. Kegiatan Pendidikan pengawasan partisipatif ini ditujukan di sekolah Tingkat SMA/SMK di Kota Tegal dengan sasaran pemilih pemula dan Masyarakat Kota Tegal, seperti tokoh Masyarakat, tokoh agama, Lembaga swadaya Masyarakat dan organisasi kepemudaan. Selain itu Bawaslu Kota Tegal menjadi narasumber Pendidikan politik yang diadakan oleh Organisasi Kepemudaan atau Organisasi Kemasyarakatan. Berikut kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Tegal pada tahun 2023 adalah: Pada tanggal 20 Januari 2023 diadakan oleh SMA Negeri 2 Tegal, kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi;

Pada tanggal 13 Juli 2023 diadakan oleh Bakesbangpol Kota Tegal, Kegiatan Sosialisasi Pendidikan politik bagi Masyarakat Kota Tegal dengan tema “Peran Perempuan untuk mensukseskan Pemilu dan Pemilukada Kota Tegal Tahun 2024”;

* Pada tanggal 17 Juli 2023 diadakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal, Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
* Pada tanggal 22 Juli 2023 diadakan oleh DPD KNPI Kota Tegal, Kegiatan Hari Ulang Tahun KNPI ke 50 dalam acara Talkshow Pendidikan Politik Bagi Pemuda;
* Pada tanggal 11 Oktober 2023 diadakan DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kota Tegal, kegiatan Pembekalan Pemilu 2024;
* Pada tanggal 14 Oktober 2023 diadakan oleh Bakesbangpol Kota Tegal, kegiatan Seminar Pendidikan Politik untuk Masyarakat Kota Tegal;
* Pada tanggal 16 s.d 30 Oktober 2023 diadakan oleh Bakesbangpol Kota Tegal, Kegiatan Sosialisasi Bagi Masyarakat (Pendidikan politik bagi Masyarakat dan pemilih pemula/pelajar SMA/SMK Kota Tegal);
* Pada tanggal 28 s.d 29 November 2023 diadakan oleh Bakesbangpol Kota Tegal, Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 dengan tema “Mewujudkan Netralitas ASN Pemerintah Kota Tegal yang Profesional dan Bebas dari Intervensi Politik serta Mendukung Sukses Pemilu 2024”.

3. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya

Selain kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif sebagaimana dijelaskan di atas, Bawaslu Kota Tegal di sepanjang tahun 2023 juga turut melakukan serangkaian kegiatan partisipatif lainnya. Diantara kegiatan tersebut adalah melakukan yang bersifat koordinasi, rapat evaluasi dan Talkshow melalui media daring dengan tujuan agar mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024, serta lebih memasifkan lagi tentang pentingnya pengawasan pemilu. Berikut rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal:

1. Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pemilu 2024, ini merupakan kegiatan awal dilaksanakan Patroli Pengawasan Kawal. Dilaksanakan pada 27 Februari 2023 di halaman Kantor Bawaslu Kota Tegal. Peserta melibatkan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan se Kota Tegal;
2. Patroli Kawal Hak Pilih Pemilu 2024 di Tempat Keramaian yaitu di Jl. Pancasila, depan kantor PDAM Kota Tegal. Dilaksanakan pada 4 April 2023. Dalam kegiatan tersebut Bawaslu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan pada hasil DPS yang akan diumumkan pada tanggal 12 April 2023. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk melakukan cek DPT Online di NIK masing-masing;
3. Rapat Evaluasi Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Kota Tegal, dilaksanakan 6 maret 2023 di halaman Kantor Bawaslu Kota Tegal. Peserta terundang adalah Pimpinan Partai Politik se-Kota Tegal dan Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Lis Herawati, S.I.Pust (KPU Kota Tegal) dan Anggota Bawaslu Kota Tegal;
4. Talkshow melalui Radio Sebayu 94 FM dengan tema Hasil Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD kotaTegal Pemilu 2024 pada 27 Maret 2023. Sebagai pembicara Akbar Kusharyanto SE (Anggota Bawaslu Kota Tegal);
5. Talkshow melalui Radio Sebayu 94 FM dengan tema Kerawanan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih 2024. Dilaksanakan pada 4 April 2023. Sebagai pembicara Wiwoho Kertarto, S.Pd (Anggota Bawaslu Kota Tegal);
6. Talkshow Live Streaming channel Youtube Radar Tegal TV dengan tema Validasi Data Pemilu 2024, sampai mana. Dilaksanakan pada 5 April 2023 dengan narasumber adalah Tunggal Prayitno, S.IP (Kabid Piak dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Tegal), Akhmad Khaerudin, SH (KPU Kota Tegal) danWiwoho Kertarto, S.Pd (Bawaslu Kota Tegal);
7. Talkshow melalui Radio RCA 94 FM dengan tema Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024. Dilaksanakan pada 24 November 2023. Sebagai pembicara Nur Aliah Saparida, S.E (Anggota Bawaslu Kota Tegal);
8. Talk show melalui Radio RCA 93.2 FM dengan tema Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu 2024. Dilaksanakan pada 16 Desember 2023. Sebagai pembicara Nur Aliah Saparida, S.E (Anggota Bawaslu Kota Tegal);
9. Rapat Koordinasi “Kesiapan Tim Pengawasan Konten Internet Pemilu 2024”. Dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023. Peserta yang terundang Staf Panwascam, Relawan Siber, IMM Kota Tegal, IPNU dan IPPNU Kota Tegal;
10. Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik/Tim Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dilaksanakan pada 20 s.d 22 Desember 2023 di Karlita Hotel. Peserta Terundang Saksi Partai politik, Saksicalon DPD, Saksi Tim PemenanganPaslonPresidendan Wakil Presiden;
11. Pencegahan pelanggaran kampanye dan pengawasan konten internet di Preimer Hotel pada 19 Desember 2023. Peserta terundang adalah Relawan Patroli Cyber.

Strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal yaitu:

1. Bawaslu Kota Tegal Ajak Organisasi Pemuda Awasi Konten Pemilu 2024 di Media Sosial

**Gambar I.7**



*Sumber: Bawaslu Kota Tegal*

Tegal, Bawaslu Kota Tegal – Bawaslu Kota Tegal ajak Organisasi pemuda awasi Konten Pemilu 2024 di Internet dalam acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet "Pencegahan Pelanggaran Kampanye dan Pengawasan Konten Internet" (19/12/2023).

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid yang menyampaikan peran organisasi pemuda dalam pengawasan pemilu 2024 terutama di media sosial karena para pemuda sudah terbiasa berselancara di dunia maya seperti Instagram dan facebook. Oleh karena itu dengan mengundang ketua organisasi pemuda kota tegal, ia mengajak agar pemuda-pemuda yang hadir turut serta mengawasi pemilu karena massifnya informasi.

Pemateri pertama, Ketua Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Septiaji Eko Nugroho, yang menyampaikan bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu sering menjadi hoax misalnya ada kabar pemenang pemiliha presiden sudah ditentukan melalui sistem padahal proses rekapitulasi masih berjalan manual dan prosesnya dari kabupaten/kota sampai nasional. Sebagai bentuk perlawanan terhadap berita hoax, mafindo menggunakan strategi prebunking yaitu Tindakan pencegahan untuk mengantisipasi dan mencegah berdarnya informasi hoax di Tengah masyarakat. Masyarakat dapat mengecek kebenaran berita di cekfakta.com dan turnbackhoax.id.

Pemateri kedua, dari Kepolisian Resor Tegal Kota, Subianto ia menjelaskan peran kepolisian dalam cyber crime (kejahatan siber) terutama berkaitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks pemilu akun-akun media sosial kampanye pemilu yang menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, keresahan dan hoax akan di takedown (dihapus) sesuai aturan yang berlaku.

Pemateri Ketiga, Pranata Komputer Ahli Muda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, Khairul Fahmi yang menjelaskan hoax sangat mudah dibuat oleh siapa saja. Ia juga memperagakan betapa mudahnya membuat berita palsu dengan mengedit judul berita resmi yang mengarah ke ujaran kebencian.

Acara ini dimoderatori oleh Rani Ingriani dan diikuti Ketua Organisasi Pemuda se-Kota Tegal meliputi KNPI, FKDM, GP Ansor, Fatayat NU, HMI, GMNI, PMII, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, SAPMA Pemuda Pancasila, Srikandi PP, Pemuda Katolik, Karang Taruna, IPM, IPNU, IPPNU, IMM, serta Alumni SKPP Bawaslu, Relawan Siber Bawaslu, dan Staf Panwaslu Kecamatan yang membidangi humas se-Kota Tegal

1. Bawaslu Kota Tegal Ajak Masyarakat dan Media Awasi Pemilu 2024 di Internet

**Gambar I.8**



*Sumber: Bawaslu Kota Tegal*

Tegal, Bawaslu Kota Tegal – Bawaslu Kota Tegal Ajak Masyarakat dan Media Awasi Pemilu 2024 di Internet dalam acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet “Partisipatif Masyarakat dan Media dalam Pengawasan Konten Pemilu 2024” (29/11/2023)

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid yang menyampaikan peran penting masyarakat dan media terhadap konten pemilu 2024 di internet yang berpotensi adanya hoax, fitnah dan ujaran kebencian.

Pemateri pertama Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika, Khairul Fahmi ia menjelaskan ada beberapa cara untuk mendeteksi berita bohong seputar pemilu, pastikan website dari sumber terpercaya, karena berita bohong biasanya dari website yang dibuat pihak tertentu dan tidak kredibel, untuk informasi dari pemerintah pastikan websitenya berakhiran .go.id. Kemudian untuk mengecek pemberitaan dapat dilakukan lewat cekfakta.com.

Pemateri kedua, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tegal, Meiwan Dani Ristanto. Ia menjelaskan bahwa hoaks pemilu seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif dan cenderung menyerang pihak tertentu.  Kemudian ia juga mengajak untuk mengecek keasilan foto dan video karena umumnya hoax menggunakan editan.Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimoderator Rani Ingriani. Turur hadiri  perwakilan organisasi pemuda serta para media massa dan online yang telah menjadi mitra Bawaslu kota Tegal.

Kota Tegal merupakan salah satu daerah Kota yang turut ikut melaksanakan Pemilu dan serentak pada Tahun 2024. Pelaksanaan pemilu serentak yang diprediksi memiliki tantangan yang besar, maka semua pihak yang berkompeten terlebih penyelenggara pemilu dituntut untuk menciptakan strategi yang efektif untuk mensukseskan pemilu yang jurdil, berintegritas dan berkeadilan. Sebagaimana kutipan artikel bahwa Rahmat Bagja anggota Bawaslu RI mengungkapkan ada 3 tantangan penyelenggaraan pemilu 2024 yakni masalah makro, masalah teknis dan masalah SDM. Masalah pertama adalah Masalah makro adanya ketentuan dalam UU pemilu yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana. Ini yang akhirnya ada yang ke DKPP dan pengadilan pidana.

Masalah kedua adalah permasalahan teknis, pertama irisan tahapan antara pemilu dan pilkada. Kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi diberbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur. Ketiga, Kendala geografis didaerah yang terisolir, dan keempat yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Masalah Ketiga adalah permasalahan SDM adhoc yaitu kesulitan rekrutmen SDM adhoc dan kapasitas SDM adhoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.

Masalah ketiga, Di Kota Tegal khususnya pada Minimnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak Partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, dan masih banyaknya politik uang yang beredar luas saat kampanye menjadikan Bawaslu mengevaluasi langkah-langkah sistem pemilu diantaranya dengan membina masyarakat dalam pemberantasan politik uang. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tegal, Akbar Kusharyanto saat Sosialisasi Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang bersama Media di ruang pertemuan Bawaslu Kota Tegal.

Bawaslu menyadari banyaknya tugas untuk mensosialisasikan politik secara pragmatis maka langkah ini diambil sebagai awal menekan pelanggaran dan perbaikan pemilu di kota Tegal, dengan dasar itu dibentuklah Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Kelurahan Anti Politik Uang.

Metode yang dilakukan Bawaslu dengan metode pendekatan pada masyarakat, terutama dalam mengedukasi untuk menolak politik uang, mensosialisasikan langsung kepada masyarakat luas tentang bagaimana cara mengawasi jalannya pemilihan umum.

Di kota Tegal ada tiga kelurahan yang di tunjuk sebagai kelurahan Pengawasan yaitu Kelurahan Tunon, Kelurahan Margadana Dan Kelurahan Panggung, sementara Kelurahan Anti Politik Uang adalah Kelurahan Slerok, Kelurahan Kraton dan Kelurahan Kalinyamat Wetan. Kriteria yang ditetapkan Bawaslu dalam menentukan kelurahan yang akan dibina adalah hubungan antara tokoh dan masyarakat yang terbuka, masyarakat terbuka dengan informasi-informasi baru, stakeholder dan masyarakat saling bersinergi serta yang terakhir kemauan bersama untuk peningkatan kualitas demokrasi.

Launching kelurahan pengawasan berlangsung pada 22 November 2019 dan kelurahan anti politik uang telah berlangsung pada 3 Oktober 2019.

Besar harapan Bawaslu dengan adanya launching tersebut masyarakat akan terbangun kesadaran untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu dan menjadi informan awal pelanggaran pemilu serta meningkatkan pengetahuan masyarakat memerangi praktik politik uang.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat yang telah di bina dapat menjadi pionir serta membagikan pemahaman yang telah diberikan oleh Bawaslu Kota Tegal kepada masyarakat lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang.

Beban pengawasan dan upaya mendorong partisipasi masyarakat memang dilimpahkan pada Bawaslu, terkhusus Bawaslu Kota Tegal. Hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Bawaslu telah diberikan amanah undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Bawaslu juga telah dilengkapi dengan struktur kelembagaan yang kuat, bahkan dilevel terbawah. Demikian pula anggaran pengawasan diberikan oleh Negara untuk mengendalikannya secara berkala. Beban pengawasan penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu.
2. Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga memiliki keterbatasan, terutama personel dan struktur yang bertugas melakukan pengawasan. Untuk Bawaslu Kota Tegal hanya diisi sepuluh orang serta jumlah anggota yang sangat terbatas ditingkat kecamatan dan lapangan. Oleh karena itu, sebagai orang yang bertugas melakukan pengawasan, perlu didorong upaya partisipasi untuk memperkuat control atas penyelenggaraan pemilu.
3. Tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan yang semakin kompleks, yaitu kecenderungan adanya berbagai pelanggaran. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara tetapi juga hak politik warga negara. Pelanggaran berupa manipulasi pemilih sepertinya tidak bisa dihindari. Apalagi wilayah Kota Tegal merupakan wilayah yang cukup besar yang memiliki. Heterogenitas masyarakat,baik secara etnis, sangat tradisional, maupun pada tingkat ekonomi, menimbulkan kesulitan lain dalam proses pemantauan pemilu. Sehingga penting untuk melibatkan masyarakat umum dalam pemantauan pemilu, tidak hanya menekankan fungsi Bawaslu sebagai lembaga tetapi juga menekankan kesadaran masyarakat secara langsung. (Aminuddin & Nasution, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi dan pengawasan Bawaslu Kota Tegal untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024, dapat dilihat pada gambar diatas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 yang masih terbilang rendah karena belum mencapai 80%. Maka, saya sebagai peneliti akan meneliti jalannya strategi dan pengawasan Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024.

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024 di Kota Tegal?

2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dalam pemilu tahun 2024 ?

## I.3 Tujuan Penelitian

### I.3.1 Tujuan Penelitian

#### I.3.1.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui strategi BAWASLU dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2024.

#### I.3.1.2 Tujuan Khusus

Untuk menganalisis sejauh mana perkembangan strategis bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum tahun 2024.

## I.4 Manfaat Penelitian

### I.4.1 Bagi Peneliti

1. Untuk mengaplikasikan pengetahuan pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang bawaslu.
2. Sebagai rujukan penelitian atau literatur review untuk penelitian selanjutnya.

### I.4.2 Bagi Lembaga Bawaslu

Menambah wawasan bagi lembaga bawaslu untuk lebih meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasana pemilihan umum.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

**II.1 Kerangka Teori**

## II.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu guna mendapatkan bahan-bahan perbandingan dan pedoman bagi penulis yang berkenan dalam pelaksanaan risetnya supaya penulis mampu memperdalam teori-teori yang dipakai dalam pengkajian risetnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang serupa dengan penulis tetapi penulis menjadikan riset terdahulu tersebut sebagai acuan yang dapat memperdalam telaah riset penulisnya. Adapun yang telah penelitian terdahulu dalam riset ini di jabarkan secara demikian oleh penulis peneliti.

**Table 2.1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAMA PENELITI &JUDUL PENELITIAN** | **HASIL PENELITIAN** | **METODE** |
| Jihad SetiawanSaputra  “Strategi Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus di Bawaslu Dompu)” | Menurut (Jihad & Saputra, 2019)Strategi Badan pengawas pemilu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan adalah Investigasi, Observasi, Pengawasan Berbasis IT dan Tracking. Investigasi berdasarkan hasil penelitian dalam investigasi di Bawaslu sudah sangat baik, Dari aspek observasi di Bawaslu sudah cukup baik dalam meningkatkan partisipasimasyarakat. Pengawasan berbasis IT sudah dilaksanakan baik di lingkungan Bawaslu maupun di lingkungan masyarakat. Tetapi di dalam pengawasan ini masih belum baik dan harus ditingkatkan lagi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dalam tata cara pengawasan berbasis IT.Dilihat dari aspek Tracking/pemantauan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik dan harus ditingkatkan lagi. | Penelitianyang digunakanyaitu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi, dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. |
| Kristian Dinata  “Peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2019” | Menurut (Issn et al., 2023) Dalam Pemilu Serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memainkan peran penting dalam mengawasi, menyelesaikan sengketa, dan menjaga integritas proses pemilu. Mereka melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, menangani pelanggaran pemilu, memantau kampanye, mengawasi penggunaan media massa, dan menyelesaikan sengketa pemilu. Melalui upaya mereka, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berhasil menjaga kualitas dan keberlanjutan proses demokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Peningkatan koordinasi dan kerjasama: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, DKPP, aparat penegak hukum, dan media massa. Kerjasama yang solid akan memperkuat pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta memperkuat integritas proses pemilu secara keseluruhan. Penguatan kapasitas: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu terus melakukan penguatan kapasitas anggotanya dalam hal pemahaman aturan pemilu, metode pengawasan yang efektif, teknologi informasi, dan penyelesaian sengketa. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan anggota Bawaslu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Peningkatan partisipasi masyarakat: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemilu sukarelawan, melaporkan pelanggaran pemilu, atau memberikan masukanterkait pelaksanaan pemilu. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, pengawasan pemilu dapat menjadi lebih efektif dan transparan. Edukasi dan sosialisasi: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas. Sosialisasi aturan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya melaporkan pelanggaran pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. | metode yang dapat digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi pemilu, baik dari segi pengawasan terhadap netralitas ASN, penanganan pelanggaran pemilu, pemantauan kampanye, pengawasan penggunaan media massa, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Dalam menggunakan metode deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen terkait pemilu. |
| Ni Made Wijayanti Kusuma Ardani & Agni Grandita Permata Sari  “Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Menggunakan Analytical Hierarchy Process” | Menurut (Perencana et al., 2022)Partisipasi pemilih pada pilkada Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari sebesar 65,63 persen pada tahun 2015 menjadi 55,7 persen pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi terbaik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada periode selanjutnya. Penelitian ini menemukan bahwa penyebaran virus Covid-19 dan buruknya cuaca yang secara teknis mempengaruhi kegiatan pilkada menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin. Sementara itu, peraturan dan produk hukum, sumber daya penyelenggara pemilu, pendanaan, dan sarana/prasarana merupakan variabel pendukung dalam meningkatkan partisipasi. KPU Kota Banjarmasin memiliki tiga inisiatif, yakni program desa peduli pemilu, sosialisasi melalui media cetak, dan sosialisasi melalui media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dari ketiga strategi tersebut, 'Desa peduli pemilu' merupakan strategi prioritas untuk mendorong keterlibatan, menurut temuan analisis menggunakan AHP. | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan melibatkan informan yang ditentukan secara purposive, yaitu: komisioner dan ketua divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan berbagai informan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kelompok pemilih yang ditentukan secara snowball. Selain itu, teknik survei juga digunakan dan analisis data menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan strategi prioritas. |
| Mita Wardiyanti, Shobirin Noer & Machwal Huda  “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019” | Menuru (Wardiyanti et al., 2023)Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu.  1) Pencegahan dilakukan melalui pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi.  2) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaiaan Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu  3) Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan standar Operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah form, setelah laporan di-input kedalam sebuah form, Kemudian dilakukan pengkajian Awal laporan atau temuan tersebut. pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pengkajian awal guna mendapatkan masukan terkait dugaan tindak pidana pemilu. | peneliti menggunakan metode kualitatif.Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019. Adapun teknik analis data yang kami gunakan ialah deskriptif Kualitatif. Analis deskriptif ini digunakan untuk menjawab gambaran tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019. |
| Firnanda & Zaili Rusli  “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah 2020” | Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasandapatdisimpulkanbahwa  strategi Bawaslu kabupaten pelalawan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah 2020 belum optimal, hal ini dikuatkan dari teori yang digunakan dengan empat indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ditemukan sedikitnya program yang baru dijalankan, serta pelanggaranpelanggaran dan kecurangan masih banyak ditemukan. Selain itu,rencanastrategimasih bergantung kepada renstra dari bawaslu pusat.Adapun faktor penghambatstrategi bawaslu pelalawan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalahcorona virus  disease (covid 19)karena menghambat kegiatan seperti sosialisasi yangdilakukan oleh bawaslu pelalawan. Selanjutnya sumber daya manusia yang  juga merupakan suatu hambatan yang dialami oleh bawaslu pelalawankarena di daerah tersebut sdm yangdimiliki masih kurang memadai sehingga sulit dicari dan menyebabkan kecurangan pelanggaran merajalela, dan yang terakhir adalah operasional sangat penting didalam pelaksanaan pilkada pada umumnya, akan tetapi pada pilkada pelalawan masih belum mendukung hal ini akses internet dan jaringan masih sulit didaerah tersebut merupakan suatu kendala atau hambatan yang serius dialami oleh bawaslu pelalawan. | PenelitianIni menggunakan jenis penelitian Kualitatif karena penelitian Ini menggunakan latar alamiahdanpeneliti inginmenggali,mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungandengan “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan  Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.”  Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data yang diperoleh tersebutlah yang menjadi bahan untuk peneliti dapat mengolah dan menganalisis.  Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Data primer  adalah data yang diperoleh penelitidengan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati Strategi Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.  Sedangkan datasekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung  Sepertimelalui Peraturan Perundang-undangan, Situs(website/Google.com) danBuku-buku.  Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian di nKantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. |

*Sumber diolah oleh penulis,2023*

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti mengenai penerapan e-government di dalam sebuah sistem pemerintahan. Namun, terdapat perbedaan yang paling mencolok dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini, perbedaan tersebut adalah pada teknik analisis yang digunakan. Dimana pada penelitian terdahulu yang digunakan. Dimana pada penelitian terdahulu meneliti pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2024 yang dimana meneliti strategi bawaslu dalam pengawasan pemilu dan proses partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2024, sedangkan teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian ini yang terdiri dari, Strategi Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemilu.

### II.1.2 Strategi

Banyak ahli mengemukakan berbagai pengertian strategi dalam karya-karya mereka masing-masing.Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara danego atau pemimpin(Timpal et al., 2021).Suatu strategi memiliki landasan atau rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, strategi pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi: memiliki beberapa makna, yaitu (1)ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang. (sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id)

Menurut (Prahalad, 2022), dalam (Duto, 2023) “Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya”. Ada beberapa jenis strategi yang diberikan oleh para ahli pada setiap buku seperti, strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversitas, strategi difensif. Adapun bentuk-bentuk strategi yaitu, strategi manajemen, strategi investasi, strategi bisnis.

Strategi adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh gunamenuju target yang telah ditetapkan . Strategi yang baik tentunya dapatmemberikan gambaran secara komprehensif terkait langkah utamamaupun pola keputusan yang harus diambil dalam rangka mewujudkantujuan(Pulungan et al., 2020).Menurut chandler Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Timpal et al., 2021).

Sebuah strategi memiliki dasar atau skema untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan demi mencapai sasaran atau keberhasilan tertentu. Strategi digunakan sebagai cara atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan strategi dapat beragam, mulai dari menjaga kepentingan, sebagai sarana evaluasi, hingga memudahkan pencapaian tujuan baik dalam konteks personal maupun organisasi.

Menurut Iman Mulyana strategi adalah ilmu dan senimenggunakan kemampuan bersamasumberdaya dan lingkungan secara efektifyang terbaik, terdapat empat unsurpenting dalam pengertian strategi yaitu:kemampuan, sumberdaya, lingkungandan tujuan, empat unsur tersebutsedemikian rupa disatukan secara rasionaldan indah sehingga muncul beberapaalternative pilihan yang kemudiandievaluasi dan diambil yang terbaik, lantashasilnya diumumkan secara tersuratsebagai pedoman taktik yang selanjutnyaturun pada linkungan operasional (Timpal et al., 2021).

Menurut (Marrus, 2002), dalam (Duto, 2023) strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana oleh manajemen senior yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi dan menguraikan metode atau inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi sebagai format atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan dan prosedur dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Strategi yang dibuat dengan baik membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya perusahaan dengan cara yang unik dan berkelanjutan. Berdasarkan kemampuan dan kelemahan internal, mengantisipasi perubahan lingkungan dan kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Berdasarkan penguraian definisi-definisi diatas, strategi dapat dianggap sebagai alat atau rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan baik dalam lingkup organisasi maupun individu. Ini mencakup penetapan tujuan jangka panjang, pengaturan langkah-langkah tindakan, pengalokasian sumber daya yang sesuai, serta integrasi kebijakan dan prosedur di dalam suatu organisasi. Strategi yang efektif tidak hanya memperhitungkan kekuatan dan kelemahan internal, tetapi juga mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan respon terhadap gerakan pesaing. Dengan demikian, strategi bukan sekadar rencana semata, tetapi merupakan proses yang melibatkan pengambilan keputusan yang rasional dan perencanaan yang menyeluruh untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### II.1.2.1 Manajemen Strategi

Menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah kombinasi antara seni dan ilmu dari perumusan, pengaplikasian, dan evaluasi dariberbagai keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya (David, 2017).Manajemen strategi mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, sedangkan perencanaan strategi hanya berkaitan dengan perumusan strategi. Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang baru dan unik di masa mendatang, dengan merencanakan masa depan yang berbeda dan berupaya mengoptimalkan tren saat ini untuk mengantisipasi perubahan di masa depan.

Adapun 3 tahap manajemen strategi menurut Fred R. David, yaitu:

1. Perumusan Srategi

Dalam perumusan strategi menurut Fred R. David merupakan tahap awal yang terdiri dari cara atau langkah-langkah untuk menentukan strategi tertentu yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telahditentukan. (David, Strategic Management, 2010, hal. 6) perumusan strategi tersebut mencakup:

1. Pengembangan visi dan misi

Visi adalah pernyataan yang menjawab pertanyaan "Kita ingin menjadi apa?" dan berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan pernyataan visi yang menyeluruh. Mengembangkan visi sering dianggap sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategi. Pernyataan misi, di sisi lain, adalah pernyataan tujuan yang secara jelas membedakan suatu organisasi dari yang lain. Misi yang jelas diperlukan untuk menetapkan sasaran yang efektif dan merumuskan strategi.

1. Identifikasi peluang

Tujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi organisasi adalah untuk mengenali variabel-variabel penting yang memerlukan tindakan. Organisasi harus mampu merespons secara ofensif maupun defensif terhadap berbagai faktor dengan merumuskan strategi yang bisa memanfaatkan peluang eksternal atau mengurangi dampak dari ancaman potensial.

1. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan organisasi

Kekuatan atau kelemahan internal, ditambah dengan peluang atau ancaman eksternal, serta pernyataan misi yang jelas, memberikan dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi tersebut dirumuskan dengan tujuan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal.

1. Penetapan tujuan jangka panjang

Tujuan jangka panjang menggambarkan hasil yang diharapkan dari penerapan strategi tertentu. Strategi merinci semua tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut.

1. Implementasi Strategi

Implementasi strategi melibatkan menggerakkan karyawan dan manajer untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Tahap ini sering dianggap sebagai yang paling sulit dalam manajemen strategi. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kemampuan interpersonal.

Implementasi strategi meliputi pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengelolaan upaya pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengaitkan kompensasi dengan kinerja karyawan.

1. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Seorang manajer harus memahami kapan sebuah strategi tidak berjalan sesuai harapan; evaluasi strategi adalah cara utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi dapat diubah di masa mendatang karena berbagai faktor eksternal dan internal yang terus berubah.

Terdapat tiga dasar kegiatan dalam evaluasi strategi yakni:

1. Mereview faktor eksternal dan internal dari strategi yang telah dilaksanakan
2. Mengukur kinerja
3. Mengambil tindakankorektif.

Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan saat ini tidak menjamin keberhasilan di masa depan. Setiap kesuksesan biasanya menimbulkan masalah baru dan berbeda.(David, 2017)

#### II.1.2.2 Jenis-jenis Strategi

Banyak organisasi menerapkan dua atau lebih strategi sekaligus, namun menjalankan strategi kombinasi akan berisiko jika terlalu berlebihan. Pada organisasi besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya diterapkan ketika berbagai divisi menjalankan strategi yang berbeda. Selain itu, organisasi yang berjuang untuk bertahan mungkin menggunakan kombinasi beberapa strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi:

1. Startegi integrasi

Integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal kadang-kadang disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan pengendalian atas distributor, pemasok, atau pesaing.

1. Strategi Intensif

Penetrasi pasar dan pengembangan produk sering disebut sebagai strategi intensif karena keduanya membutuhkan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada.

1. Strategi Diversifikasi

Ada tiga jenis strategi diversifikasi: diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru yang masih berhubungan disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak berhubungan tetapi untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak berhubungan disebut diversifikasi konglomerat.

1. Strategi Difensif

Strategi defensif adalah strategi yang dijalankan berdasarkan prinsip rasionalitas, baik dalam hal likuidasi, pengelolaan biaya, atau aspek lainnya. Rasionalitas ini bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan tanpa merusak skema dan alur yang sudah ada.

#### II.2.1.3 Tujuan Strategi

Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi, serta merupakan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan ini berupa target kuantitatif yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan kinerja perusahaan.Strategi bisa menjadi jembatan yang memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Strategi ini tidak hanya berlaku untuk pencapaian tujuan pribadi, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks kelompok dan organisasi.

Menurut suwandiyono (2010:02), terdapat empat tujuan manajemen strategi, yaitu:

1. Mengarahkan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan merupakan tanggung jawab manajer strategi. Dalam konteks ini, manajer strategi harus mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Kehadiran arah yang jelas akan memberikan landasan bagi pengendalian dan evaluasi keberhasilan.
2. Membantu mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak adalah suatu hal yang penting. Organisasi atau perusahaan harus dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak, termasuk pemasok, karyawan, pemegang saham, lembaga keuangan, dan masyarakat umum, yang semuanya memiliki peran yang penting dalam kesuksesan atau kegagalan perusahaan.
3. Mengantisipasi perubahan dengan merata adalah hal yang penting. Manajemen strategi memungkinkan para eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan panduan serta pengendalian yang memungkinkan mereka untuk meluaskan perspektif waktu dan pemikiran mereka, serta memahami kontribusi yang baik untuk masa sekarang dan masa depan.
4. Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, tugas seorang manajer tidak hanya terbatas pada memperhatikan kemampuan dalam hal efisiensi, tetapi juga penting untuk berkomitmen pada upaya meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

#### II.1.2.4 Manfaat Strategi

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan atau bimbingan terhadap sekelompok individu menuju tujuan atau maksud yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Peran manajer menjadi sangat penting dalam situasi-situasi di mana organisasi menghadapi tantangan dan memerlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang dikenal dengan istilah manajemen strategi. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah strategis dalam organisasi, terutama terkait dengan persaingan, manajer didorong untuk berpikir secara kreatif atau strategis.

Menyusun alternatif solusi yang beragam setelah melakukan analisis yang cermat dapat membawa hasil yang lebih menguntungkan. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, antara lain:

1. Memberikan arah jangka panjang yang dituju oleh organisasi.
2. Membantu organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.
3. Meningkatkan efektivitas suatu organisasi
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif organisasi dalam lingkungan yang berisiko.
5. Aktivitas pembuatan strategi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah masalah di masa depan.
6. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi dapat meningkatkan motivasi mereka selama proses implementasi.
7. Mengurangi tumpang tindih dalam aktivitas.
8. Mengurangi ketidaknyamanan karyawan lama terhadap perubahan.

### II.1.3 Pengawasan

Seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1998:58), dalam (Sururama & Amalia, 2020) Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimaksudkan “to exercise restraint or direction over; dominate; command” (Ndraha, 2000:194). Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi.

Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi *(built-in-control, internal control dan self control)* dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.

Mc. Farland dalam Handayaningrat (1981:143) dari buku (Sururama & Amalia, 2020) memberikan definisi pengawasan *(control)* sebagai berikut: *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies”.* (pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.

Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui untuk kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab dari ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.(Sururama & Amalia, 2020)

#### II.1.3.1 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan dalam managemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan terdapat adanya persimpangan dan tindakan signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dnan mengambil tindakan penyimpangan tersebut, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Baihaqi, 2018 dalam (Syahputri & Adi, 2020)mengatakan bahwa “ fungsi pengawasan merupakan tahap dari sistem manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan, dengan rencana menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan dan proses manajerial. Sedangkan menurut Engkoswara, 2018 dalam (Syahputri & Adi, 2020) mengemukakan fungsi pengawasan antara lain :

1. Memperoleh data yang telah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan dimasa yang akan datang
2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebgaai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan
3. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dhadapi agar dapat dikurangi atau dihindari.
4. Memperoleh data yang dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang
5. Mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai.

#### II.1.3.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai fungsi salah satu manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambunga, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentuka. Menurut Ranupandojo dalam (Duto, 2023) tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan akan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. Terwujudnya organisasi yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Husaini (Baktiyasa, 2017) dalam (Syahputri & Adi, 2020), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan, melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Amiruddin, 2016 dalam (Syahputri & Adi, 2020) pengawasan bertujuan untuk menunjukan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan, maupun hal-hal lainnya.

### II.1.4 Partisipasi Masyarakat

1. **Definisi Partisipasi**

Menurut (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46) dalam (Ferdinand, 2010). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) dalam (Ferdinand, 2010) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) diambil dari (Ferdinand, 2010)mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

1. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Maka, kesimpulan partisipasi adalah pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan memberikan dukungan ( tenaga, pikiran maupun materi ) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama, partisipasi merupakan suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat.

1. **Definisi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Menurut Gaventa dan Valderma dalam (Bruno, 2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk menuangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.

b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.

c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.

d. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematik, bukan hal yang insidental.

e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).

f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah.

(Siti Irene, 2011:55) Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting.Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi.Untuk itu Cohne dan Uphoffmengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu :

a. Penduduk setempat

b. Pemimpin masyarakat.

c. Pegawai pemerintahan

d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu. (Bruno, 2019)

Moeljanto dalam (Bruno, 2019)menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan harus memaksimumkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah :

1. Berorietasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
2. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
3. Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing – masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
4. Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama – sama dengan rakyat.
5. **Bentuk Partisipasi**

Menurut Keith Davis (dalam Intan dan Mussadun, 2013:34) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa :

* 1. Pikiran,merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
  2. Tenaga,merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
  3. Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
  4. Keahlian,merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan
  5. Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
  6. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.(Bruno, 2019)

Menurut Isbandi dalam Deviyani (2013:3) menyatakan ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
2. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda biasanya berupa alat-alat atau perkakas. (Gitleman & Kleberger, 2014)

Adapun indikator partisipasi masyarakat menurut Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko (2015: 82); (Mustanir, Ahmad; Abadi, 2016) antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah setiap program pembangunan termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin)untuk sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pembangunan sangat diperlukan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan bersama. (Gitleman & Kleberger, 2014)

### II.1.4.1 Pengawasan Pemilu

1. **Teori Pengawasan**

Menurut George R. Tery dalam (Durbridge & MR. Wade, 2008) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko dalam (Durbridge & MR. Wade, 2008) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

1. **Tipe Pengawasan**

Menurut Donnelly dalam (Durbridge & MR. Wade, 2008) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan *(Preliminary Control)*

Pengawasan pendahuluan *(preliminary control)*, yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi, Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial.

1. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung *(Concurrent Control)*Pengawasan pada saat kerja berlangsung *(concurrent control)* adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

*Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1. Pengawasan *FeedBack (FeedBack Control)*

Pengawasan *FeedBack(feedback control)* yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

1. **Definisi Pemilu**

PEMILU menurut pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017(UU Nomor 7 Tahun, 2017) adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun PEMILU Menurut Morissan, Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Pemilu adalah hak dari Negara yang diberikan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil nya di pusaran kekuasaan.(Durbridge & MR. Wade, 2008).

Pengawasan Pemilihan Umum adalah upaya untuk mengawal jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum agar proses dan tahapannya berlangsung dengan jujur, adil, demokratis serta tidak melanggar perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji dan memeriksa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 32 tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah).

## II.2 Definisi Konsep

1. **Strategi Pengawasan**

Strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana oleh manajemen senior yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi dan menguraikan metode atau inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, untuk pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar.

1. **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang *alternative* solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

1. **Pengawasan Pemilu**

Pengawasan Pemilihan Umum adalah upaya untuk mengawal jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum agar proses dan tahapannya berlangsung dengan jujur, adil, demokratis serta tidak melanggar perundang-undangan.

## II.3 Pokok-Pokok Penelitian

Pokok penelitian merupakan skup atau ruang lingkup penelitian. Hal ini berfungsi untuk memberi petunjuk pada objek yang akan diteliti. Guna memfokuskan arah dalampenelitian ini, peneliti menetapkan pokok-pokok penelitianberdasarkan teori manajemen strategi Fred R. David, Manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang dilakukan oleh organisasi untuk dapat mencapai tujuan dengan terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu :

1. Perumusan strategi
2. Implementasi strategi
3. Evaluasi Strategi

## II.4 Alur Pikir

**Gambar II.1**

Meningkatkan Partisipasi Masayarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024

Strategi Bawaslu

Landasan Hukum: Pasal 96 UU No.07 Tahun 2017

Tingkat Partisipasi Masayrakat Kota Tegal Dalam Pengawasan Pemilu Masih Rendah

Evaluasi

Strategi

ImplementasiStrategi

PerumusanStrategi

# 

# BAB III METODE PENELITIAN

## III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penelitian dalam mendeskripsikan tentang Strategi Badan Pengawas Pemilu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2024 di Kota Tegal.

## III.2 Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52112, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal yang beralamat di Jl. Sumbrodo No. 20, Slerok, Kec. Tegal Timur., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis ingin melakukan penelitian terhadap strategi bawaslu kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2024, yang dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2014 dan 2019 yang masih terbilang rendah.

## III.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

* 1. Data Primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya. Data-data primer dapat diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, atau melakukan pengantaran langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat.
  2. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen lembaga atau institusi tertentu, laporan, karya tulis orang lain, maupun surat kabar. Untuk memperoleh data sekunder, penulis akan meminta data kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Dimana data sekunder ini merupakan data pendukung penelitian ini.

## III.4 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*yaitu pengambilan informan tersebut supaya memahami permasalahan yang sesuai dengan topic. Menurut Sugiyono (2010) metode ini guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih *representative*.

**Table III.1 Informan Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | JumlahInforman |
|  | Nur Aliyah Saparida, S.E. | Komisioner Bawaslu Kota Tegal | 1 |
|  | Fauzi Romadhoni | Ketua Panwascam Tegal Selatan | 1 |
|  | Farhaindi Dwi Harjo | Ketua Panwascam Tegal Timur | 1 |
|  | Muhammad Ridwan | Ketua Panwascam Tegal Barat | 1 |
|  | Wagyu Nur | Ketua Panwascam Margadana | 1 |

## III.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

1. Wawancara

Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau pernyataan yang berkaitan dengan riset yang akan diteliti.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, serta foto-foto untuk melengkapi data dari hasil wawancara.

## III.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tools Nvivo 12 Plus. Software NVivo 12 Plus digunakan dalam pembuatan koding (coding) dari data hasil wawancara terhadap narasumber terpilih. Tujuan utama melakukan koding adalah untuk membentuk kategori-kategori utama berdasarkan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan peneliti. Software NVivo 12 Plus dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi ide-ide utama yang muncul dari data penelitian.Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan memvisualisasikan hasil pengolahan data dengan software NVivo ini kedalam bentuk model-model visualisasi, grafik-grafik atau diagram-diagram NVivo.

**Gambar III.1Tahapan Analisis Data Nvivo 12 Plus**

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

## III.7 Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

I.2 Rumusan Masalah

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

II.1 Kerangka Teori

II.2 Definisi Konsep

II.3 Pokok-Pokok Penelitian

II.4 Alur Pikir

**BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

III.2 Lokus Penelitian

III.3 Jenis dan Sumber Data

III.4 Informan Penelitian

III.5 Teknik Pengumpulan Data

III.6 Teknik dan Analisis Data

III.7 Sistematika Penulisan

**BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

IV.1 Gambaran Umum

IV.2 Wilayah Administrasi

IV.3 Kondisi Pemerintahan

IV.4 Visi dan Misi Kota Tegal

IV.5 Kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

IV.6 Kondisi Kependudukan

IV.7 Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal

IV.8 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V.1 Hasil Penelitian

V.2 Pembahasan Hasil Penelitian

**BAB VI PENUTUP**

V1.1 Kesimpulan

VI.2 Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## IV.1 Gambaran Umum

### IV.1.1 Keadaan Geografis

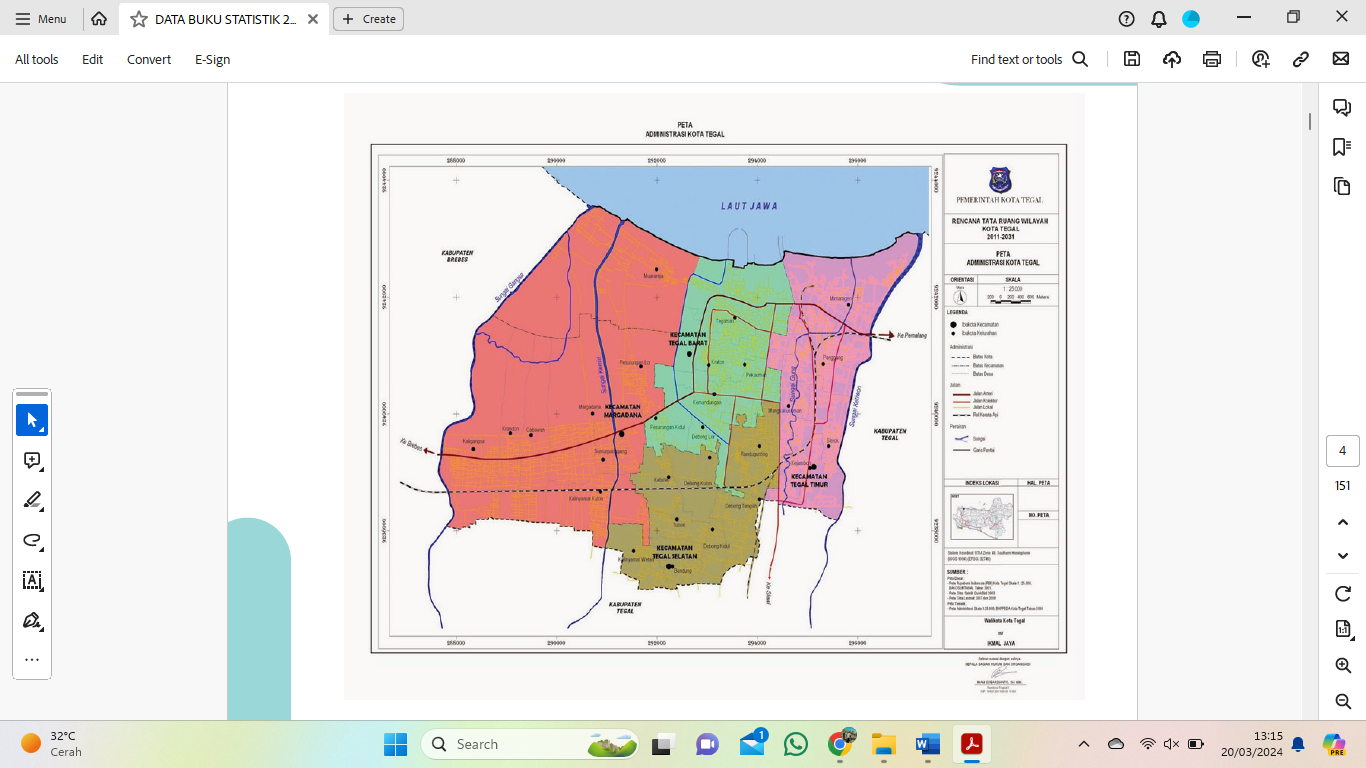
Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yangberada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 109004’28” sampai 109009’41” garis Bujur Timur dan 06050’21” sampai 06054’00” garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan dua kabupaten: sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Adapun di sebelah Utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, yang kemudian ditambah lagi dengan wilayah Kabupaten Brebes, yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Selanjutnya luas wilayah Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami perubahan kembali sesuai dengan hasil kegiatan Penegasan Batas Daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Luas wilayah Kota Tegal tahun 2023 adalah 39,14 km2, atau sekitar 0,12 persen dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi 4 Kecamatandengan 27 Kelurahan. Adapun wilayah Kecamatan terluas adalah Margadana yaitu sebesar 13,28 km2 atau sekitar 33,93 persen dari luas wilayah Kota Tegal.

Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa. Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun lembah. Sedangkan untuk keberadaan sungai, Kota Tegal dialiri empat sungai yang melewati 15 kelurahan (55,56 persen). Empat sungai tersebut adalah Ketiwon, Kaligangsa, Gung, dan Kemiri. Sedangkan kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sebanyak 4 kelurahan.*Sumber: Bawaslu Kota (Tegal)*

**Gambar IV.1Peta Kota Tegal**



*Sumber : Kota Tegal Dalam Angka 2022\_2023*

## IV.2 Wilayah Administrasi

Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27kelurahan. yaitu:

1. Tegal Selatan. Terdiri dari delapan kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan. Bandung. Debong Kidul. Tunon. Keturen. Debong Kulon. Debong Tengah. dan Randugunting.
2. Tegal Timur. Terdiri dari lima kelurahan yaitu Kejambon. Slerok. Panggung. Mangkukusuman dan Mintaragen.
3. Tegal Barat. Terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Pesurungan Kidul. Debong Lor. Kemandungan. Pekauman. Kraton. Tegalsari dan Muarareja.
4. Margadana. Terbagi menjadi tujuh kelurahan yaitu Kaligangsa. Krandon. Cabawan. Margadana. Kalinyamat Kulon. Sumurpanggang. dan Pesurungan Lor.

Pada tahun 2023,untuk mempermudah dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat. wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi ke dalam 166 Rukun Warga (RW) dan 1.125 Rukun Tetangga (RT).*(Sumber: Bawaslu Kota Tegal)*

## IV.3 Kondisi Pemerintahan

Dalam pemerintahan eksekutif. pada tahun 2023 Kota Tegal memiliki 3.094 PNS di lingkungan dinas/instansi pemerintah. Jika dilihat komposisi seluruh PNS menurut jenis kelamin. banyaknya pegawai laki-laki danperempuan hampir berimbang yaitu 1.454 pegawai laki-laki dan 1.640 pegawai perempuan. Dari segi pendidikan. komposisi PNS di lingkungan pemerintahan Kota Tegal didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir sarjana ke atas. yaitu sebanyak 1.716 pegawai. Menurut kepangkatan. pegawai dengan golongan III ke atas dengan rincian pegawai golongan III sebanyak 1.970 orang dan pegawai golongan IV sebanyak 623 pegawai.*(Sumber: Bawaslu Kota Tegal)*

**Tabel IV.1Tingkat Pendidikan PNS di Kota Tegal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tingkat**  **pendidikan** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah total** |
| SD | 30 | - | 30 |
| SMP | 45 | 3 | 48 |
| SMA | 249 | 130 | 424 |
| Diploma I | - | - | - |
| Diploma II | 13 | 8 | 21 |
| Diploma III | 162 | 336 | 498 |
| Diploma IV | 33 | 33 | 66 |
| S1/Sarjana | 687 | 1.029 | 1.716 |
| S2/Pasca Sarjana | 188 | 100 | 288 |
| S3/Doktor/Ph.D | 2 | 1 | 3 |
| KOTA TEGAL | 1.454 | 1.640 | 3.094 |

*Sumber : Kota Tegal Dalam angka 2022­\_2023*

## IV.4 Visi dan Misi Kota Tegal

1. Visi Kota Tegal Tahun 2019-2024

“Terwujudnya Pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Displin dan Inovatif”

1. Misi Kota Tegal 2019-2024
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel,berwibawa dan inovatif berbasis teknologi informasi ;
3. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis,aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak danperempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender;
4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu;
5. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidupyang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yangberorientasi pada energy terbarukan;
6. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah sertamengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
7. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan senibudaya.

*(Sumber: Bawaslu Kota tegal)*

## IV.5 Kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pada tahun 2023. Anggota DPRD di Kota Tegal diduduki oleh 30 orang anggota yang berasal dari 7 partai politik. Dengan rincian anggota terdiri dari 26 orang anggota laki-laki dan 4 orang anggota perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi S1. yaitu sebanyak 11 orang (10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Adapun jika dilihat menurut kelompok umur. jumlah anggota DPRD terbanyak pada kelompok umur 36-50 tahun dan 51-60 tahun yang masing-masing sejumlah 12 orang.

*(Sumber: Bawaslu Kota tegal)*

**Tabel IV.2Jumlah Anggota DPR Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelompok umur | Jenis kelamin/Gender | | |
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah total |
| < = 35 | 2 | - | 2 |
| 36-50 | 10 | 2 | 12 |
| 51-60 | 10 | 2 | 12 |
| >= 61 | 4 | - | 4 |
| Kota tegal | 26 | 4 | 30 |

*Sumber :Kota Tegal Dalam angka 2022\_2023*

## IV.6 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kota Tegal tahun 2023 semester II berdasarkan data administrasi Dinas Penduduk dan Catatan Sipil sebanyak 282.781 jiwa yang terdiri atas 142.593 jiwa penduduk laki-laki dan 140.188 jiwa penduduk perempuan.

Dari perbandingan ini diperoleh rasio jenis kelamin 101,71. Artinya pada setiap sekitar 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Pada tahun 2024, persentase jumlah penduduk tersebesar menurut kecamatan di Kota Tegal terdapat pada Kecamatan Tegal Timur sebesar 28.87%. Persentase ini berbanding lurus dengan kepadatan penduduk di Kota Tegal tahun 2023 di kecamatan ini. Kepadatan Kecamatan Tegal Timur mencapai 11.384 jiwa/km2. Artinya setiap 1 km2 di Kecamatan Tegal Timur terdapat sekitar 11.384 jiwa. Kondisi ini terjadi karena wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat pendidikan di Kota Tegal.

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk Kota Tegal pada kelompok usia lanjut mengerucut dan jumlah penduduk paling banyak pada usia muda.*(Sumber:Bawaslu Kota tegal).*

**Tabel IV.3Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kelompok umur** | **Jenis kelamin** | | |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah Total** |
| 0-4 | 11.638 | 11.180 | 22.818 |
| 5-9 | 10.886 | 10.214 | 21.100 |
| 10-14 | 10.842 | 10.267 | 21.109 |
| 15-19 | 11.232 | 10.656 | 21.888 |
| 20-24 | 11.282 | 10.581 | 21.863 |
| 25-29 | 11.315 | 10.640 | 21.955 |
| 30-34 | 11.314 | 10.547 | 21.861 |
| 35-39 | 11.378 | 10.657 | 22.035 |
| 40-44 | 11.896 | 11.295 | 23.191 |
| 45-49 | 11.126 | 10.657 | 21.783 |
| 50-54 | 8.874 | 8.743 | 17.617 |
| 55-59 | 6.771 | 7.291 | 14.062 |
| 60-64 | 5.341 | 6.187 | 11.528 |
| 65-69 | 4.311 | 5.058 | 9.369 |
| 70-74 | 2.686 | 3.433 | 6.119 |
| 75+ | 1.701 | 2.782 | 4.483 |
| **Kota Tegal** | 142.593 | 140.188 | 282.781 |

*Sumber: (Kota Tegal Dalam Angka 2023\_2024)*

## IV.7 Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal

Bawaslu Kota Tegal adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kota yang berada di Indonesia. "Bawaslu" merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, sedangkan "Kota Tegal" merujuk pada wilayah administratif di Indonesia yaitu Kota Tegal. Bawaslu Kota Tegal bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta penindakan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tegal, yang meliputi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Sejarah Bawaslu Kota Tegal dimulai seiring dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum secara mandiri. Bawaslu Kota Tegal didirikan sebagai salah satu bagian dari Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk menjalankan tugas pengawasan pemilihan umum di administrasi wilayah Kota Tegal

Bawaslu Kota Tegal memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tegal. Bawaslu Kota Tegal memiliki wewenang untuk mengamati, mengawasi, dan mengendalikan seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Bawaslu Kota Tegal juga memiliki kewenangan untuk menyelediki dan menindak pelanggaran pemilihan umum, termasuk pelanggaran terkait kampanye, pemilihan ganda, politik uang, dan pelanggaran administrasi lainnya.

Sebagai lembaga independen, Bawaslu Kota Tegal bertugas menjaga netralitas dan objektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan. BawasluKota Tegal bekerja sama dengan penyelenggara pemilihan umum, partai politik, dan masyarakat sipil dalam memastikan upaya penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, dan adil di Kota Tegal. Bawaslu Kota Tegal juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilihan umum untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di masa yang akan datang. (Bawaslu Kota Tegal)

## 

## IV.8 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal

Bawaslu Kota Tegal memiliki beberapa bagian atau unit yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tegal. Berikut adalah penjelasan tentang tupoksi setiap bagian Bawaslu Kota Tegal:

1. Bagian Pengawasan: Bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tegal. Tupoksi dari Bagian Pengawasan meliputi:

* Melakukan pengawasan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan umum, seperti persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara.
* Menerima, memeriksa, dan mengirim laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum dari masyarakat, partai politik, atau pihak lain.
* Melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan umum, termasuk mengumpulkan barang bukti, menyelenggarakan pemeriksaan saksi, dan menyusun laporan hasil pengawasan.
* Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Tegal terkait tindakan yang diperlukan sebagai hasil dari pengawasan yang dilakukan.

1. Bagian Hukum: Bagian ini bertanggung jawab untuk memberikan dukungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tegal. Tupoksi dari Bagian Hukum meliputi:

* Memberikan konsultasi hukum kepada pimpinan dan anggota Bawaslu Kota Tegal terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.
* Melakukan analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran pemilihan umum dan memberikan saran hukum kepada Bagianan Pengawas dalam menghadapi kasus tersebut.
* Lihat dokumen hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tegal, seperti peraturan daerah, perjanjian kerja sama, dan surat keputusan.

1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga: Bagian ini bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan lembaga terkait dalam rangka memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tupoksi dari Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga meliputi:

* Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan peran Bawaslu Kota Tegal dalam pengawasan pemilihan umum.
* Jalin hubungan dengan media massa dan mengkoordinasikan publikasi terkait pengawasan pemilihan umum.
* Mengkoordinasikan kerjasama antara Bawaslu Kota Tegal dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pihak politik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemilihan umum.

1. Bagian Administrasi dan Keuangan: Bagian ini bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan bawaslu, Adapun tugas pokoknya yaitu meliputi:

* Menyelenggarakan tugas dan fungsi administrasi dan keuangan, termasuk mengelola keuangan Bawaslu Kota Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Menyusun rencana anggaran Bawaslu Kota Tegal, melakukan pengurusan dan pelaporan keuangan, serta melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan ketentuan-undangan yang berlaku.
* Melakukan pengarsipan, pemeliharaan, dan pengelolaan dokumen administrasi Bawaslu Kota Tegal.
* Mengalihkan tugas dan fungsi administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan logistik Bawaslu Kota Tegal.

1. Bagian Pengawasan Internal: Bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di internal Bawaslu Kota Tegal. Tupoksi dari Bagian Pengawasan Internal meliputi:

* Melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan aktivitas Bawaslu Kota Tegal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas.
* Melakukan evaluasi risiko terhadap kinerja Bawaslu Kota Tegal, termasuk mengidentifikasi potensi, mengendalikan risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
* Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Bawaslu Kota Tegal, baik secara rutin maupun ad-hoc.
* Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Tegal terkait tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan internal Bawaslu Kota Tegal.

Itulah penjelasan tentang tupoksi setiap bagian Bawaslu Kota Tegal. Sebagai lembaga pengawas independen, Bawaslu Kota Tegal memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tegal.

(Bawaslu Kota Tegal). mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm